

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rusdi. "Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia: Studi Awal di Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik* Vol 1, no. 1 (2018): 1-16. Diakses pada 10 April 2019. <https://doi.org/10.22146/jaap.35332>.
- Ariyanto, Dodik dan Dewi, Ayu Aryista. "Oportunistik Incumbent dalam Penganggaran Pendapatan dan Belanja pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017." *JIAB* 14, no. 1 (2019): 41-55. Diakses pada 5 April 2019. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2019.v14.i01.p05>.
- Badan Pusat Statistik Kulon Progo. 2019. Kulon Progo dalam Angka. Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo.
- Badan Pusat Statistik Sleman. 2019. Sleman dalam Angka. Sleman: BPS Kabupaten Sleman.
- Bastian, Indra. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 2001*. Yogyakarta: PPA FE UGM dan BPFE Yogyakarta.
- Hadi, Syamsul. "Perbedaan dan Persamaan Kualitatif dan Kuantitatif." 2017. <http://www.maribelajarbkk.web.id/2014/12/perbedaan-dan-persamaan-kualitatif-dan-kuantitatif.html> (diakses 20 April 2017) Dikutip dalam Kuncoro, Mudrajat. *Filosofi dan Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomika*. Disunting oleh Jogiyanto Hartono. (Program Magister Sains dan Doktor: BPFE Yogyakarta: 2017).
- Hakim, Aziz Rachman. 2016. "Identifikasi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)." Skripsi Gelar Sarjana. Universitas Gadjah Mada.
- Ikhsan, Arfan. 2008. *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jones, Rowan dan Pendlebury, Maurice. 2000. *Public Sector Accounting*. Edisi Kelima. Harlow: Prentice Hall.
- Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Presiden Republik Indonesia. 22 Oktober.
- Miles, B Matthev, Michael Huberman, dan Saldana Johny. 2014. "Qualitative Data Analysis." Edisi Ketiga. Sage Publication. Dikutip dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Perbup Sleman No. 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sri Purnomo. 2 Desember.
- Perbup Sleman No. 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sri Purnomo. 31 Desember.

- Perbup Kulon Progo No. 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah. Budi Antono. 25 Oktober.
- Perda Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Budi Antono. 16 September.
- Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Sri Purnomo. 13 September.
- Perda Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman. 29 Juli.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Dalam Negeri. 15 Mei.
- Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Menteri Dalam Negeri. 19 Mei.
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Presiden Republik Indonesia. 9 Desember.
- PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Presiden Republik Indonesia. 16 Maret.
- PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Presiden Republik Indonesia. 12 Maret.
- Putra, Nusa. 2013. *Penelitian Kualitatif IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Ratna, Ikhwan. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau." *Jurnal Kutubkhanah Vol 18, No 2 (2015): 112-129*. Diakses pada 17 Mei 2019. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/1476>.
- Ruwaida, Darwanis, dan Abdullah, Syukriy. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan di Provinsi Aceh". *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala volume 4, no 4 (2015):101-110*. Diakses pada 19 Agustus 2019. [https://www.researchgate.net/publication/319006729\\_FAKTOR-FAKTOR\\_YANG\\_MEMPENGARUHI\\_REALISASI\\_ANGGARAN\\_BELANJA\\_PENDIDIKAN\\_DI\\_PROVINSI\\_ACEH](https://www.researchgate.net/publication/319006729_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_REALISASI_ANGGARAN_BELANJA_PENDIDIKAN_DI_PROVINSI_ACEH).
- Sinaga, Edward James. "Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah." *Jurnal Rechts Vinding BPHN volume 5, no. 2 (2016): 261-274*. Diakses pada 15 Mei 2019. <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/14>.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Penelitian Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Dwi dan Djuminah. "The Usefulness of Local Government Financial Statements for Regional Development Planning Process (An Empirical Study Against the Head of the District Development Planning Agencies in Java and Madura)". *Procedia – Social and Behavioral Sciences* no. 211 (2015): 75-80. Diakses pada 15 Mei 2019. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.012>
- Syauqi, Ahmad. 2009. *Problem Desentralisasi dan perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*. Disunting oleh Abdul Halim dan Ibnu Mujib. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- UUD RI. 1945. Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.
- UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Presiden Republik Indonesia. 5 April.
- UU No. 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon-Progo. Presiden Republik Indonesia. 15 Oktober.
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Presiden Republik Indonesia. 2 Oktober.
- UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Presiden Republik Indonesia. 5 Oktober.
- Von Hagen, J. "Fiscal Institutions and Fiscal Performance." *The Economic and Social Review*, 33(3), 263–284. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>. 2002. Dikutip dalam Ariyanto, Dodik dan Dewi, Ayu Aryista. "Oportunistik Incumbent dalam Penganggaran Pendapatan dan Belanja pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017." *JIAB* 14, no. 1 (2019): 41-55. Diakses pada 5 April 2019. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2019.v14.i01.p05>
- Yin, Robert K. 2014. *Case Study Research*. Edisi Kelima. California: Sage Publication, Inc.